

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu selama sepuluh tahun berturut-turut seperti yang tertera pada Tabel 1.1. Saat penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 Abdul Halim selaku Bupati Bantul menegaskan bahwa diluar perolehan opini tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditindak lanjuti (Bantul, 2022). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai organisasi tipe A memiliki tanggungjawab kerja yang cukup besar yang bertugas untuk menjalankan dan menunjang urusan keuangan daerah. Oleh karena itu BPKPAD bertugas memaksimalkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai wujud efektivitas kinerjanya.

Tabel 1.1
Hasil Pemerinksaan LKPD Tahun Anggaran 2012 s.d 2021 di
Wilayah Kabupaten Bantul

No	Tahun Anggaran	Opini LKPD
1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP
5	2016	WTP

No	Tahun Anggaran	Opini LKPD
6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2019	WTP
9	2020	WTP
10	2021	WTP

Sumber; Yogyakarta.bpk.go.id

Berdasarkan Laporan Kinerja (2021) dan Rencana Kerja (2022), pelaksanaan kinerja BPKPAD Kabupaten Bantul masih memiliki beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi. Salah satu isu tersebut yakni implementasi SAP berbasis akrual belum memadai serta dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dari kepala unit kerja sebagai kuasa pengguna anggaran dan barang masih memiliki komitmen yang rendah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan daerah dengan tertib.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPKPAD Tahun 2016-2021 terdapat misi peningkatan tata kelola pemerintah agar lebih efisien. Peningkatan dilakukan dengan percepatan reformasi birokrasi dengan tujuan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SAP berbasis akrual dengan strategi memperbaiki komitmen seluruh jajaran pemerintah terkait penerapan SAP berbasis akrual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Penelitian Candra (2021) membuktikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) . Ketiga variabel ini mempengaruhi dengan arah positif yang berarti jika komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi SDM semakin baik maka penerapan SAP berbasis akrual juga semakin baik. Penelitian Rananda (2021) membuktikan bahwa insentif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yakni pengakuan atas asset, beban, pendapatan, kewajiban, dan ekuitas pada laporan keuangan dengan basis akrual, serta pengakuan belanja, pendapatan, dan pembiayaan pada laporan pelaksanaan anggaran atas dasar basis sesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara maupun daerah (Atmini, 2012). Implementasi Standar ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan disiapkan dengan matang serta terstruktur. Penerapan SAP berbasis akrual ini dapat menghindari adanya pengeluaran anggaran yang kurang penting dan tidak dibutuhkan sehingga tercapainya efisiensi anggaran. Al-Qur'an banyak memberi penjelasan dan gambaran terkait hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

(27) إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (27)”

Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27 di atas menjelaskan tentang Allah SWT yang memberikan nikmat rezeki kepada setiap manusia untuk digunakan dalam hal kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Allah SWT dengan jelas melarang manusia menggunakan harta atau rezeki yang telah diberikan untuk hal-hal yang berlebihan dan tidak bermanfaat karena hal tersebut merupakan sikap yang dimiliki oleh setan dan termasuk ke dalam perbuatan ingkar kepada Allah SWT. Firman Allah tersebut sejalan dengan aktifitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan bijak.

Pemerintah sebagai pemegang tanggungjawab mengelola keuangan harus memperhatikan pengeluaran anggaran agar digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Pengungkapan informasi keuangan juga harus dilakukan secara transparan kepada pihak dalam maupun luar organisasi yang nantinya dapat dijadikan sumber dalam pengambilan keputusan (Agustina, 2020). Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam hal penganggaran, akuntansi, hingga pelaporannya.

Kegiatan pengelolaan keuangan negara saat ini berpengaruh pada pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Sebagai upaya pengembangannya pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang bersifat sementara dan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kemudian diganti menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Adanya peraturan pemerintah yang baru ini membuat pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan basis akrual.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi seputar posisi keuangan dan perubahannya, serta kinerja yang memiliki manfaat bagi penggunaannya. Laporan keuangan dikatakan akurat dan memiliki integritas tinggi jika penyajiannya dilakukan dengan relevan. Penggambaran kondisi keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih relevan dan banyak memperoleh opini WTP (Rosydiana dan Gunawan 2018). Pada Penelitian yang dilakukan Hendra dan Amirudin (2021) membuktikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul tengah melakukan berbagai sosialisasi dan studi komparasi terkait dengan penggunaan salah satu aplikasi perwujudan aksi nyata atas pemenuhan fasilitas dari Kementrian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Aplikasi ini dinamakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Rencana penggunaan aplikasi memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah atas dasar ekonimsasi, efektivitas, efisiensi, akuntabel, transparan, dan auditabel. Adanya SIPKD ini menjadi wujud usaha dalam memaksimalkan implementasi teknologi

dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. BPKPAD Kabupaten Bantul melakukan studi komparasi dengan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang sudah lebih dulu menerapkan SIPKD.

Komitmen organisai yang kuat dalam diri pegawai saat melakukan kerjanya diperlukan sebagai bentuk upaya efektivitas dan efisiensi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Karyogis dan Putra 2017). Komitmen organisasi merupakan kepercayaan pekerja akan nilai-nilai yang ada di organisasi, dan kerelaan dalam keikutsertaan pekerja mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut berarti bahwa rasa tanggungjawab, kesadaran menjalankan pekerjaan, dan motivasi dalam pelaporan aktivitas penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik akan ada di setiap diri pekerja (Oktavia dan Rahayu 2019). Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pegawai tidak menjadi alasan terkendalanya penyajian laporan kinerja terkait kebenaran dan ketepatan waktu merupakan salah satu bukti bahwa komitmen organisasi mempengaruhi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual (Agustina, 2020). Fasilitas pelatihan bagi pekerja dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan bekerja sesuai denngan tugasnya.

Perkembangan teknologi secara pesat merupakan salah satu dampak Globalisasi banyak mempengaruhi dan bermanfaat bagi kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan implementasi akuntansi akrual (Rananda 2021). Komputerisasi yang terdapat dalam pengolahan transaksi-transaksi pada laporan dan

analisa laporan dapat menjadi salah satu pendukung kecepatan serta ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Komputerisasi tersebut merupakan bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan (Erawati dan Kurniawan 2018).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan prilaku, ilmu, karakteristik, dan pengalaman dalam upaya menjalankan suatu pekerjaan yang memiliki daya guna. Kompetensi juga dapat dikaitkan dengan kecakapan individu dalam melaksanakan perintah atau tugas sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya yang didasarkan pada posisi yang sudah ditetapkan pada organisasi terkait (Habiburrahman dan Zhavira 2021). Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran pada implementasi SAP berbasis akrual karena dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik akan melahirkan kecapakan dalam tanggung jawab dan pelaksanaan tugas pada bidang akuntansi akrual (Rananda 2021). Penyusunan rencana dan bentuk dukungan untuk keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menjadi salah satu tugas penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (Erawati dan Kurniawan 2018).

Pemberian insentif dari pihak organisasi kepada pekerjanya merupakan bentuk motivasi dalam meningkatkan kinerja dan menjadi suatu usaha pencapaian tujuan terkait implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Insentif yang diberikan berupa gaji pokok pegawai sebagai upah jasa dan penghormatan atas pengembangan kemampuan dan

pencapaian prestasi yang telah dilakukan. Setiap pegawai yang bekerja tentu bertujuan untuk mendapat gaji. Oleh karena itu, insentif berupa gaji diasumsikan menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pegawai akan berusaha menerapkan SAP berbasis akrual karena tahu akan ada insentif yang mereka peroleh setelah melakukan tugas dan kewajiban mereka. Semangat pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi dapat meningkat seiring dengan adanya insentif yang diterima (Nasution, 2018). Insentif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Sa'diyah dan Yuhertiana 2021).

Penelitian ini merupakan penggabungan beberapa penelitian terdahulu dengan melakukan kompilasi variabel dari penelitian Candra (2021) dan Rananda (2021). Variabel komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi SDM penelitian Candra (2021), kemudian variabel insentif dari penelitian Rananda (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada objek penelitian. Peneliti memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai objek yang akan diteliti.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian ulang terkait penerapan SAP berbasis akrual karena pada setiap penerapan yang dilakukan di tempat yang berbeda tentu akan memiliki kendala yang berbeda beda. Oleh karena itu peneliti berminat untuk melakukan penelitian ulang yang diberi judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan**

Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Insentif Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Empiris: Perangkat Daerah Kabupaten Bantul).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI?
4. Apakah insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI

3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh insentif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi akademikus dalam menjalankan penelitian-penelitian di masa mendatang khususnya penelitian terkait implementasi SAP berbasis akrual.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penyelesaian masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam memberi bantuan pemikiran kepada pihak pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya penerapan SAP berbasis akrual yang dirasa kurang memadai.